



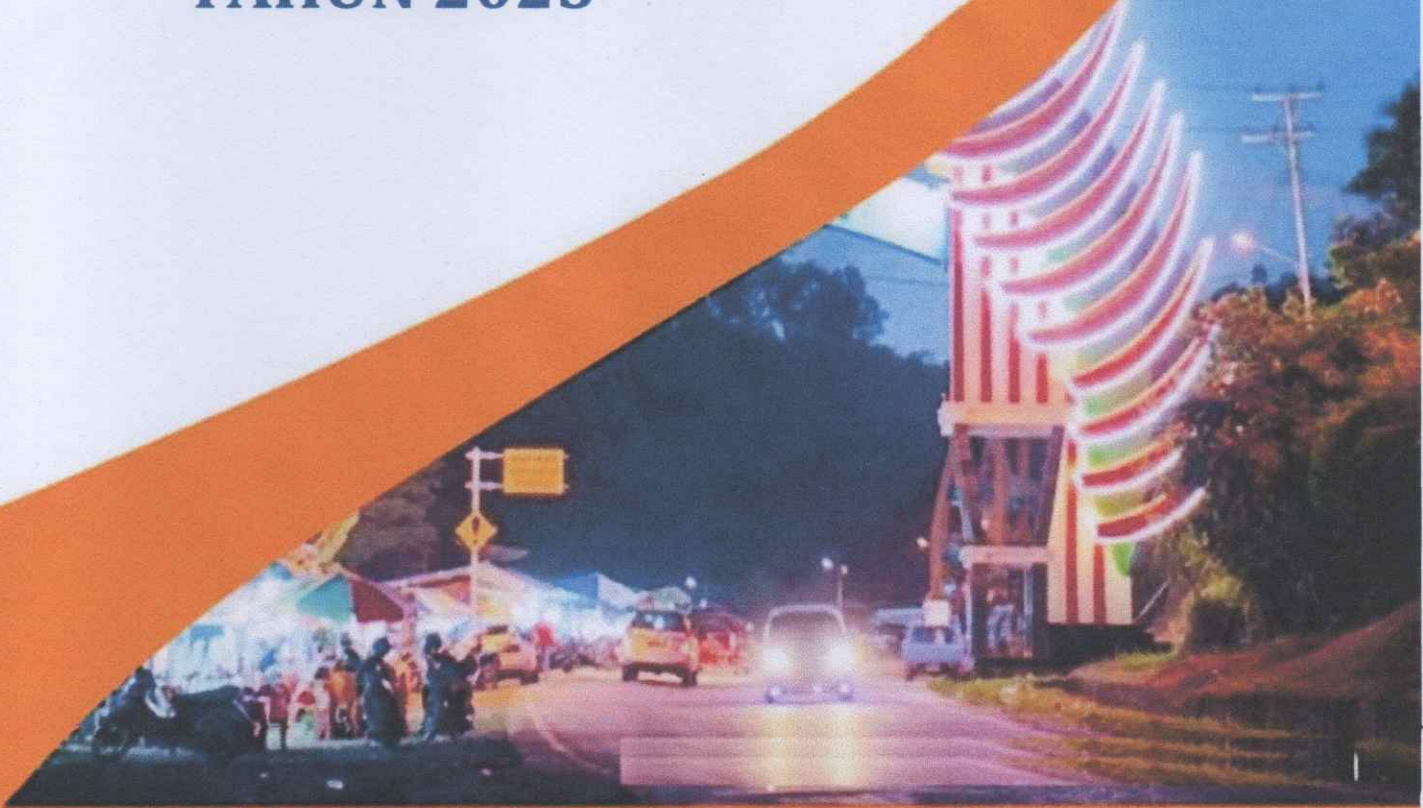
DPMDPPKB

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**



bkkbn

GAP & GBS TAHUN 2025



Jln. Setia Budi No. 200 Painan Kode Pos : 25611
Telp. (0756) 21293 email : dpmdppkbpessel@gmail.com

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

SKPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

Program : 2.13.05 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Kegiatan : 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan Desa Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan Desa Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam daerah Kabupaten/Kota	PKK adalah organisasi kemasyarakatan untuk memberdayakan perempuan dan berpartisipasi dalam pembangunan kesejahteraan Indonesia. Gerakan PKK bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan	Akses : Untuk mencapai target SDG, penurunan AKI hingga 70 kematian per 100.000 kelahiran pada tahun 2030 tidak bisa hanya dengan mengandalkan tenaga kesehatan saja tapi juga dibutuhkan upaya dari masyarakat Partisipasi : Masih Rendahnya minat masyarakat untuk menjadi kader maupun pengurus PKK, inisiatif kader yang masih kurang, dan dari masyarakat sendiri sebagai target program PKK Kontrol : Memberdayakan masyarakat dalam bidang kesehatan, terutama dari aspek promotif dan preventif.	Kurangnya SDM dan Inisiatif Kader PKK	Kurangnya minat masyarakat untuk menjadi kader maupun pengurus PKK.	Tujuan : Memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.	Pelaksanaan Pembinaan secara terus-menerus terkait 10 Program Pokok PKK dan manfaatnya Mengaktifkan Pokja-Pokja PKK, sesuai 10 program pokok PKK di antaranya yaitu penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup, serta perencanaan sehat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Fasilitasi PKK: - PKK = 198 - Posyandu = 678 - KPM = 182 Jumlah Nagari di Kab. Pesisir Selatan 182 Nagari/Desa.	Input : Dana / Anggaran Rp. 1.000.000.000 SDM : Kader PKK, Pengurus Pokja, Petugas Nakes, serta dari Kelembagaan PKK. Peralatan dan Sarana : Spanduk, Pamflet Outdoor dan Indoor, Banner, dan Media KIE Lainnya Output : Terlaksananya peningkatan kualitas SDM Pengurus Pokja PKK Outcome : - Meningkatnya SDM Pengurus Pokja dan Peserta yang dilatih

Sub Kegiatan : Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Tujuan : Memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum	PKK diharapkan bisa menjadi wadah yang mampu menjembatani antara kepentingan keluarga dan pemerintah. Serta berperan aktif sebagai subyek pembangunan sebagaimana 10	Manfaat : Menjadi wadah yang mampu menjembatani antara kepentingan keluarga dan pemerintah. Serta berperan aktif sebagai subyek pembangunan sebagaimana 10 program pokok PKK, dengan sasaran meningkatkan kesejahteraan bagi individu dan keluarga maupun bagi kepentingan pengabdian bagi bangsa dan negara.						- Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam kegiatan PKK
---	--	---	--	--	--	--	--	--

Catatan :

- A. Implementasi GAP sebagaimana matriks di atas bisa diletakkan sebagai pola pikir dalam penyusunan suatu dokumen kebijakan atau sebagai dokumen pendamping suatu rencana kebijakan atau program, kegiatan tertentu yang dipilih sesuai dengan prioritas.
- B. GAP ditingkat program dapat dilakukan apabila kegiatan-kegiatan yang ada didalamnya berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 90 Tahun 2020 merupakan kegiatan dengan ciri dan atau lokasi yang sama.
- C. Apabila kegiatan-kegiatan dalam sebuah program sangat beragam, atau sangat banyak, berbeda ciri dan atau lokasi maka analisis gender menggunakan GAP berbasis sub kegiatan.

Painan, 14 Juni 2024


PIC KEPALA DINAS PMDPPKB
KAB. PESISIR SELATAN
SALMAN ALFARISI BRUTU, S.STP., M.Si
NIP. 19780215 199802 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Setia Budi Nomor 200 Painan, kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,
Laman <https://dpmdppkb.pesisirselatankab.go.id/Pos-el/dinaspemdes@pesisirselatankab.go.id>

**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)**

SKPD	:	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	:	2025
Program	:	2.13.05 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
Kegiatan	:	2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan Desa Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	:	2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
Analisis Situasi	:	1. Data Pembuka Wawasan : PKK adalah organisasi kemasyarakatan untuk memberdayakan perempuan dan berpartisipasi dalam pembangunan kesejahteraan Indonesia. Gerakan PKK bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. PKK diharapkan bisa menjadi wadah yang mampu menjembatani antara kepentingan keluarga dan pemerintah. Serta berperan aktif sebagai subyek pembangunan sebagaimana 10 program pokok PKK. 2. Isu dan Faktor Kesenjangan : A. Faktor Kesenjangan - Akses : Untuk mencapai target SDG, penurunan AKI hingga 70 kematian per 100.000 kelahiran pada tahun 2030 tidak bisa hanya dengan mengandalkan tenaga kesehatan saja tapi juga dibutuhkan upaya dari masyarakat. - Partisipasi : Masih Rendahnya minat masyarakat untuk menjadi kader maupun pengurus PKK, inisiatif kader yang masih kurang, dan dari masyarakat sendiri sebagai target program PKK. - Kontrol : Memberdayakan masyarakat dalam bidang kesehatan, terutama dari aspek promotif dan preventif. - Manfaat : Menjadi wadah yang mampu menjembatani antara kepentingan keluarga dan pemerintah. Serta berperan aktif sebagai subyek pembangunan sebagaimana 10 program pokok PKK, dengan sasaran meningkatkan kesejahteraan bagi individu dan keluarga maupun bagi kepentingan pengabdian bagi bangsa dan negara.

	B. Penyebab Internal : Kurangnya SDM dan Inisiatif Kader PKK. C. Penyebab Eksternal : Kurangnya minat masyarakat untuk menjadi kader maupun pengurus PKK.
Rencana Tindak Lanjut	: Kegiatan : - Pelaksanaan Pembinaan secara terus-menerus terkait 10 Program Pokok PKK dan manfaatnya. - Mengaktifkan Pokja-Pokja PKK, sesuai 10 program pokok PKK di antaranya yaitu penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup, serta perencanaan sehat. Tujuan : Memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan Aktivitas : - Melakukan penyuluhan dan pengorganisasian kelompok-kelompok masyarakat, terutama para ibu rumah tangga. - Meningkatkan peran aktif Kader PKK serta Pokja-Pokjanya. - Melaksanakan Pelatihan dan Lomba Kader PKK. Sumber Daya (Input) : - Dana : DAU - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga - SDM : Kader PKK serta Pengurus Pokja PKK - Sarana dan Prasarana Outcome : - Meningkatnya SDM Pengurus Pokja dan Peserta yang dilatih - Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan PKK Output : - Terlaksananya peningkatan kualitas SDM Pengurus Pokja PKK
Alokasi Sumber Daya	: Anggaran Rp. 1.000.000.000 SDM : Kader PKK, Pengurus Pokja, Petugas Nakes, serta dari Kelembagaan PKK. Peralatan dan Sarana : Spanduk, Pamflet Outdoor dan Indoor, Banner, dan Media KIE Lainnya

Painan, 14 Juni 2024


 Plt. KEPALA DINAS PMDPPKB
 KAB. PESISIR SELATAN
SALMAN ALFARIZI BRUTU, S.STP., M.Si
 NIP. 19780215 199802 1 001

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

SKPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan
 Program : 2.14.03 Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
 Kegiatan : 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Kegiatan : Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Sub Kegiatan : Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal Tujuan : Melakukan pembentukan karakter bangsa terutama dikalangan generasi muda dan remaja.	Duta GenRe memiliki peran penting dalam menjembatani komunikasi dan interaksi generasi muda dengan pemerintah swasta, LSM serta seluruh stakeholder di Kabupaten Pesisir Selatan. Kegiatan ini sebagai upaya pembinaan dan pembentukan karakter generasi muda, sehingga mampu mewujudkan generasi yang, sehat berprestasi dan berakhlak mulia. Jumlah BKR 97 Kelompok Jumlah PIK-R 57 Kelompok	Akses : - Masih kurangnya informasi dan wadah tentang pelaksanaan kegiatan Partisipasi : - Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Program Keluarga Berencana bagi Masyarakat. Kontrol : - Masih kurang terwadahnya pelaksanaan kegiatan GenRe. Manfaat : - GenRe mempunyai peran penting dalam menjembatani Media Komunikasi dan interaksi generasi muda dengan pemerintah, Swasta, LSM serta seluruh stakeholder.	GenRe masih bias terhadap Gender.	- Stigma masyarakat bahwa permasalahan yang sering ditengah masyarakat hanya persolan yang diselesaikan oleh remaja itu sendiri bukan tanggung jawab bersama. - Kurangnya menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja tentang usia perkawinan.	Tujuan : Melakukan pembentukan karakter bangsa terutama dikalangan generasi muda dan remaja. Dalam rangka merespon permasalahan yang sering terjadi pada remaja, juga untuk menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja melalui pemahaman tentang pendewasaan usia perkawinan.	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal untuk pelaksanaan kegiatan Pemilihan Duta GenRE Mengedukasi dan memberikan informasi kepada remaja indonesia agar menjadi generasi yang mempunyai perencanaan kehidupan yang matang.	Jumlah BKR 97 Kelompok Jumlah PIK-R 57 Kelompok Jumlah Duta GenRe Kab. Pessel 150 Orang Jumlah Nagari di Kab. Pesisir Selatan 182 Nagari/Desa.	Input : Rencana Aksi Dana/Anggaran Rp.125.000.000,- Output : - Jumlah Duta GenRe yang terpilih untuk mengikuti Pemilihan Duta GenRe Tingkat Provinsi, serta Duta-Duta GenRe Pelopor ditingkat Kecamatan (Sekolah-Sekolah). - Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Outcome : Terwujudnya Generasi Berencana (Duta GenRe) yang menjadi ujung tombak pembangunan khususnya bagi remaja

Dalam rangka merespon permasalahan yang sering terjadi pada remaja, juga untuk penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja melalui pemahaman tentang pendewasaan usia perkawinan.	Jumlah Duta GenRe Kab.Pessel 150 Orang Jumlah Nagari di Kab. Pesisir Selatan 182 Nagari/Desa.							Indikator Kinerja Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal
---	--	--	--	--	--	--	--	---

Catatan :

- A. Implementasi GAP sebagaimana matriks di atas bisa diletakkan sebagai pola pikir dalam penyusunan suatu dokumen kebijakan atau sebagai dokumen pendamping suatu rencana kebijakan atau program, kegiatan tertentu yang dipilih sesuai dengan prioritas.
- B. GAP ditingkat program dapat dilakukan apabila kegiatan-kegiatan yang ada didalamnya berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 90 Tahun 2020 merupakan kegiatan dengan ciri dan atau lokasi yang sama.
- C. Apabila kegiatan-kegiatan dalam sebuah program sangat beragam, atau sangat banyak, berbeda ciri dan atau lokasi maka analisis gender menggunakan GAP berbasis sub kegiatan.

Painan, 14 Juni 2024


 Plt. KEPALA DINAS PMDPPKB
 KAB. PESISIR SELATAN

SALMAN ALFARISI BRUTU, S.STP., M.Si
 NIP. 19780215 199802 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 Jl. Setia Budi Nomor 200 Painan, kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,

Laman [https://dpmdppkb.pesisirselatankab.go.id/Pos-el dinaspemdes@pesisirselatankab.go.id](https://dpmdppkb.pesisirselatankab.go.id/Pos-el%20dinaspemdes@pesisirselatankab.go.id)

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)

SKPD	:	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	:	2025
Program	:	2.14.03 Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
Kegiatan	:	2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
Sub Kegiatan	:	2.14.03.2.01.0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal
Analisis Situasi	:	1. Data Pembuka Wawasan : Duta GenRe memiliki peran penting dalam menjembatani komunikasi dan Interaksi generasi muda dengan pemerintah swasta, LSM serta seluruh stakeholder di Kabupaten Pesisir Selatan. Kegiatan ini sebagai upaya pembinaan dan pembentukan karakter generasi muda, sehingga mampu mewujudkan generasi yang hebat, sehat berprestasi dan berakhlak mulia. Jumlah BKR : 97 Kelompok Jumlah PIK-R : 57 Kelompok Jumlah Duta GenRe Kab.Pessel : 150 Orang 2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender : A. Faktor Kesenjangan - Akses Masih kurangnya informasi dan wadah tentang pelaksanaan kegiatan GenRe - Partisipasi Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Program Keluarga Berencana bagi Masyarakat. - Kontrol Masih kurang terwadahnya pelaksanaan kegiatan GenRe. - Manfaat GenRe mempunyai peran penting dalam menjembatani komunikasi dan interaksi generasi muda dengan pemerintah, swasta, LSM serta seluruh stakeholder B. Penyebab Internal GenRe masih bias terhadap Gender C. Penyebab Eksternal : Stigma masyarakat bahwa persoalan yang sering terjadi ditengah masyarakat hanya persoalan yang diselesaikan oleh remaja itu sendiri bukan tanggung jawab bersama.

Rencana Tindak	: Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal, Untuk pelaksanaan kegiatan pemilihan Duta GenRe Tujuan : Mengedukasi dan memberikan informasi kepada remaja Indonesia agar menjadi generasi yang punya perencanaan kehidupan yang matang Aktivitas : - Memberikan Sosialisasi tentang peran remaja ke sekolah-sekolah. - Meningkatkan peran aktif remaja baik ditengah masyarakat masyarakat maupun sebagai konselor teman sebaya di sekolah (PIK-R). - Melaksanakan Pemilihan Duta GenRe mulai dari Tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Sumber Daya (Input) : - Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum. - Dana Mandiri yang diupayakan oleh Forum Duta GenRe berupa Sumbangan Sponsor, Pemda dll. - Media Informasi, Remaja GenRe, Kader KB, Penyuluh KB dan Kelembagaan KB, Guru-Guru Sekolah dan Petugas Kesehatan. - Sarana dan Prasarana : Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Output : - Jumlah Duta GenRe yang terpilih untuk mengikuti Pemilihan Duta GenRe Tingkat Provinsi, serta Duta-Duta GenRe pelopor ditingkat Kecamatan (Sekolah-Sekolah). - Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Outcome : Terwujudnya Generasi Berencana (Duta GenRe) yang menjadi ujung tombak pembangunan khususnya bagi remaja.
Alokasi Sumber Daya	: Anggaran Rp. 125.000.000,- SDM : Generasi Berencana (Genre), Kader KB, Penyuluh KB, Guru-Guru Sekolah dan Tenaga Kesehatan. Peralatan dan Mesin : Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), Spanduk, Pamlet Outdoor dan Indoor, Salempang, Sertifikat dan Piala Penghargaan.

Painan, 14 Juni 2024


 PIC KEPALA DINAS PMDPPKB
 KAB. PESISIR SELATAN
SALMAN ALFARISI BRUTU, S.STP., M.Si.
 NIP. 19780215 199802 1 001

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

SKPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan
 Program : 2.14.03 Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
 Kegiatan : 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : 2. Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Kegiatan : 2. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 2. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	MKJP adalah : Alat kontrasepsi yang digunakan untuk menunda, menjarangkan kehamilan, serta menghentikan kesuburan yang digunakan dengan jangka panjang yang meliputi IUD, Implant, dan Kontap. MKJP merupakan kontrasepsi yang dapat dipakai dalam jangka waktu lama lebih dari 2 tahun, efektif dan efisien untuk tujuan pemakaian menjarangkan kelahiran lebih dari 3 tahun atau mengakhiri kehamilan atau sudah tidak ingin menambah anak lagi Jumlah Peserta MKJP/KB Baru : IUD : 254 Implan : 993 MOW dan MOP: 183	Akses : Kurangnya masyarakat yang belum mendapatkan informasi yang benar tentang Metoda Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan menganggap KB hanya perempuan yang melaksanakan. Partisipasi : - Masih Rendahnya Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam penggunaan KB MKJP Kontrol : - Masih kurang diterapkannya Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE).	Metoda KB MKJP masih bias Gender	Stigma ditengah masyarakat bahwa metode KB MKJP banyak menimbulkan komplikasi dan banyak mitos yang menyesatkan.	Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan Norma Keluarga kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS) yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertambahan penduduk.	Pelaksanaan sosialisasi secara terus-menerus tentang manfaat KB MKJP Pelayanan KB di Faskes	Jumlah Peserta MKJP/KB Baru : 1430 IUD : 254 Implan : 993 MOW dan MOP: 183	Input : Dana / Anggaran (DAK KB) Rp. 656.375.445,- SDM : Kader KB, Penyuluh KB, Petugas Nakes, serta dari Kelembagaan KB Peralatan dan Mesin: Alat Kontrasepsi, Spanduk, Pamflet Outdoor dan Indoor, Banner, Lembar Balik, dan APE Alokon Output : Dokumen Pelayanan MKJP Outcome: Jumlah Peserta KB MKJP yang terlayani

Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan Norma Keluarga kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS) yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk.		Manfaat : Metoda Kontrasepsi Jangka Panjang dapat meningkatkan derajat kesehatan Ibu, bagi Ibu yang ber KB MKJP dapat mencegah Anemia, mencegah kehamilan yang tidak diinginkan serta meningkatkan keharmonisan keluarga.					Jumlah Nagari di Kab. Pesisir Selatan 182 Nagari/Desa.	Jumlah masyarakat (sasaran) yang telah mendapatkan informasi melalui sosialisasi
--	--	---	--	--	--	--	--	--

Catatan :

- A. Implementasi GAP sebagaimana matriks di atas bisa diletakkan sebagai pola pikir dalam penyusunan suatu dokumen kebijakan atau sebagai dokumen pendamping suatu rencana kebijakan atau program, kegiatan tertentu yang dipilih sesuai dengan prioritas.
- B. GAP ditingkat program dapat dilakukan apabila kegiatan-kegiatan yang ada didalamnya berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 90 Tahun 2020 merupakan kegiatan dengan ciri dan atau lokasi yang sama.
- C. Apabila kegiatan-kegiatan dalam sebuah program sangat beragam, atau sangat banyak, berbeda ciri dan atau lokasi maka analisis gender menggunakan GAP berbasis sub kegiatan.

Painan, 14 Juni 2024


PIC. KEPALA DINAS PMDPPKB
KAB. PESISIR SELATAN
SALMAN ALFARINI BRUTU, S.STP., M.Si
NIP. 19780215 199802 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Setia Budi Nomor 200 Painan, kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,
Laman <https://dpmdppkb.pesisirselatankab.go.id/Pos-el/dinaspemdes@pesisirselatankab.go.id>

**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)**

SKPD	:	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	:	2025
Program	:	2.14.03 Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
Kegiatan	:	2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	:	2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Analisis Situasi	:	1. Data Pembuka MKJP adalah : Alat kontrasepsi yang digunakan untuk menunda, menjarangkan kehamilan, serta menghentikan kesuburan yang digunakan dengan jangka panjang yang meliputi IUD, Implant, dan MKJP merupakan kontrasepsi yang dapat dipakai dalam jangka waktu lama lebih dari 2 tahun, efektif dan efisien untuk tujuan pemakaian menjarangkan kelahiran lebih dari 3 tahun atau mengakhiri kehamilan atau sudah tidak ingin menambah anak lagi Jumlah Peserta MKJP/KB Baru : 1.430 - IUD : 254 - Implan : 993 - MOW dan MOP : 183 2. Isu dan Faktor Kesenjangan : A. Faktor Kesenjangan - Akses : Kurangnya masyarakat yang belum mendapatkan informasi yang benar tentang Metoda Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan menganggap KB hanya perempuan yang melaksanakan. - Partisipasi : Masih Rendahnya Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam penggunaan KB MKJP - Kontrol : Kurangnya Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi tentang Metoda MKJP - Manfaat : Metoda Kontrasepsi Jangka Panjang dapat meningkatkan derajat kesehatan Ibu, bagi Ibu yang ber KB MKJP dapat mencegah Anemia, mencegah kehamilan yang tidak diinginkan serta meningkatkan keharmonisan keluarga.

	B. Penyebab Internal : Metoda KB MKJP masih bias Gender C. Penyebab Eksternal : Stigma ditengah masyarakat bahwa metode KB MKJP banyak menimbulkan komplikasi dan banyak mitos yang menyesatkan.
Rencana Tindak lanjut	: Kegiatan - Pelaksanaan sosialisasi secara terus-menerus tentang manfaat KB - Pelayanan KB di Faskes Tujuan Meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS) yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk. Aktivitas - Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang Metoda KB MKJP - Meningkatkan peran aktif Kader KB, Penyuluh KB serta Kelembagaan KB - Melaksanakan Pelayanan KB MKJP di Faskes Sumber Daya (Input) Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Sarana dan Prasarana : Media Informasi Outdoor dan Indoor. Outcome - Jumlah Peserta KB MKJP yang terlayani - Jumlah masyarakat (sasaran) yang telah mendapatkan informasi melalui sosialisasi Output: Dokumen Pelayanan MKJP
Alokasi Sumber Daya	: Anggaran Rp. 656.375.445 SDM : Kader KB, Penyuluh KB, Petugas Nakes, serta dari Kelembagaan KB Peralatan dan Mesin : Alat Kontrasepsi, Spanduk, Pamflet Outdoor dan Indoor, Banner, Lembar Balik, dan APE Alokon

Painan, 14 Juni 2024


 Plt. KEPALA DINAS PMDPPKB
 KAB. PESISIR SELATAN
SALMAN ALFARISI BRUTU, S.STP., M.Si.
 NIP. 19780215 199802 1 001

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

SKPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

Program : 2.14.03 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Kegiatan : 2 14 03 2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

Sub Kegiatan : 2 14 03 2.04 0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : 4. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Kegiatan : 4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Sub Kegiatan : 4. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas.	Pengendalian angka kelahiran adalah salah satu aspek utama dalam Program KB. Mengaktifkan Unit Sarana Kelompok Kegiatan (Poktan) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang ada di kampung Jumlah Nagari di Kab. Pesisir Selatan 182 Nagari/Desa.	Akses : - Banyaknya Kelompok-Kelompok Kegiatan yang Tidak Aktif, akibat kurangnya pembinaan dan SDM kader dilapangan - Masih kurangnya tentang keberadaan Kelompok Kegiatan di Nagari. Partisipasi : - Kurangnya peran aktif kader pada Kelompok Kegiatan di Nagari	- Kurangnya Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) di Nagari	- Untuk dapat melindungi kelompok-kelompok rentan yang menjadi sasaran dilingkungan keluarga masing-masing terlebih dahulu harus mempunyai data keluarga dan informasi yang lengkap dan benar untuk dijadikan pedoman kegiatan.	- Terwujudnya Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti pelaksanaan dan pengelolaan program bangsa kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana).	• Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang Penyediaan Data dan Informasi Keluarga. • Meningkatkan peran aktif dari masyarakat untuk melengkapi Data dan Informasi Keluarga Berencana. • Kelompok Kegiatan (Poktan) Kab. Pesisir Selatan yang terdiri dari : BKL, BKR, BKB, PIK-R dan UPPKA. • Meningkatkan peran aktif Kader KB, Penyuluh KB dan Korlap KB serta lembaga dari KB.	- Terdapat 525 Kelompok Kegiatan (Poktan) di Kab. Pesisir Selatan yang terdiri dari : BKL = 127, BKR = 104, BKB = 213, PIK-R = 57, UPPKA = 71. Jumlah Nagari di Kab. Pesisir Selatan 182 Nagari/Desa.	Input : Dana/Anggaran (DAK KB) Rp. 2.328.600.000,- Output : - Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) di Kampung Keluarga Berkualitas Outcome : - Meningkatnya Kualitas Kesejahteraan Keluarga.

Tujuan : Terwujudnya Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti pelaksanaan dan pengelolaan program bangga kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kontrol : Keterbatasan kemampuan mengambil keputusan secara mandiri oleh kader Manfaat : - Meningkatnya kualitas kesejahteraan keluarga dengan meningkatnya partisipasi dan keaktifan keluarga memberikan data dan informasi yang dibutuhkan sehingga data dan informasi yang tersedia lebih valid. - Dengan kata lain memberikan pemahaman kepada keluarga terkait hak dan kebutuhan khususnya, sehingga bisa meningkatkan kualitas keluarga						
--	---	--	--	--	--	--	--

Catatan :

- A. Implementasi GAP sebagaimana matriks di atas bisa diletakkan sebagai pola pikir dalam penyusunan suatu dokumen kebijakan atau sebagai dokumen pendamping suatu rencana kebijakan atau program, kegiatan tertentu yang dipilih sesuai dengan prioritas.
- B. GAP ditingkat program dapat dilakukan apabila kegiatan-kegiatan yang ada didalamnya berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 90 Tahun 2020 merupakan kegiatan dengan ciri dan atau lokasi yang sama.
- C. Apabila kegiatan-kegiatan dalam sebuah program sangat beragam, atau sangat banyak, berbeda ciri dan atau lokasi maka analisis gender menggunakan GAP berbasis sub kegiatan.

Painan, 14 Juni 2024

Pt. KEPALA DINAS PMDPKB
KAB. PESISIR SELATAN

SALMAN ALFARISI BRUTU, S.STP., M.Si
NIP. 19780215 199802 1 001



PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)

SKPD	:	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	:	2025
Program	:	2.14.03 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
Kegiatan	:	2 14 03 2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
Sub Kegiatan	:	2 14 03 2.04 0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas
Analisis Situasi	:	1. Data Pembuka Wawasan : • Pengendalian angka kelahiran adalah salah satu aspek utama dalam Program KB. • Mengaktifkan Unit Sarana Kelompok Kegiatan (Poktan) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang ada di kampung keluarga berkualitas. • Jumlah Nagari di Kab. Pesisir Selatan 182 Nagari/Desa. 2. Isu dan Faktor Kesenjangan : a. Faktor Kesenjangan : • Akses : - Banyaknya Kelompok-Kelompok Kegiatan yang Tidak Aktif, akibat kurangnya pembinaan dan SDM kader dilapangan. - Masih kurangnya tentang keberadaan Kelompok Kegiatan di Nagari. • Partisipasi : - Kurangnya peran aktif kader pada Kelompok Kegiatan di Nagari. • Kontrol : - Keterbatasan kemampuan mengambil keputusan secara mandiri oleh kader. • Manfaat : - Meningkatnya kualitas kesejahteraan keluarga dengan meningkatnya partisipasi dan keaktifan keluarga memberikan data dan informasi yang dibutuhkan sehingga data dan informasi yang tersedia di kampung Keluarga berkualitas lebih valid. - Dengan kata lain memberikan pemahaman kepada keluarga terkait hak dan kebutuhan khususnya, sehingga bisa meningkatkan kualitas keluarga tersebut. b. Penyebab Internal : • Kurangnya Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) di Nagari c. Penyebab Eksternal : • Untuk dapat melindungi kelompok-kelompok rentan yang menjadi sasaran dilindungan keluarga masing-masing terlebih dahulu harus mempunyai data keluarga dan informasi yang lengkap dan benar untuk dijadikan pedoman kegiatan.

Rencana Tindak	: Kegiatan : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Tujuan : • Terwujudnya Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti pelaksanaan dan pengelolaan program bangga kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana). Aktivitas : • Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang Penyediaan Data dan Informasi Keluarga. • Meningkatkan peran aktif dari masyarakat untuk melengkapi Data dan Informasi Keluarga Berencana. • Kelompok Kegiatan (Poktan) Kab. Pesisir Selatan yang terdiri dari : BKL, BKR, BKB, PIK-R dan UPPKA. • Meningkatkan peran aktif Kader KB, Penyuluh KB dan Korlap KB serta lembaga dari KB. Sumber Daya (Input) : Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga. Kelompok Kegiatan (Poktan) Kab. Pesisir Selatan yang terdiri dari : BKL, BKR, BKB, PIK-R dan UPPKA. Sarana dan Prasarana : Media Informasi Outdoor dan Indor. Output : - Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) di Kampung Keluarga Berkualitas Outcome : - Meningkatnya Kualitas Kesejahteraan Keluarga
Alokasi Sumber Daya	: Anggaran : Rp. 2.328.600.000,- SDM : Kelompok Kegiatan (Poktan) Kab. Pesisir Selatan yang terdiri dari : BKL, BKR, BKB, PIK-R dan UPPKA. Peralatan dan Mesin : Blanko Pengisian Pendataan Keluarga (PK), Alat Tulis Kantor (ATK), Media Spanduk, Pamlet Outdoor dan Indor.

Painan, 14 Juni 2024


PIC KEPALA DINAS PMDPPKB
KAB. PESISIR SELATAN
SALMAN ALFARISI BRUTU, S.STP., M.Si
NIP. 19780215 199802 1 001

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

SKPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan
 Program : 2.14.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
 Kegiatan : 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0014 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : 3. Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Kegiatan : 3. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Sub Kegiatan : 3. Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Pelaksanaan pendampingan dengan melibatkan tim pendamping keluarga yang terdiri dari Bidan di desa, kader TP PKK dan Kader KB diharapkan dapat memberikan dampak signifikan dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu, balita dan fasilitasi bantuan sosial stunting bagi keluarga berisiko stunting.	Akses: Perlunya meningkatkan akses informasi dan pelayanan kepada keluarga dan/atau keluarga berisiko stunting seperti ibu hamil, ibu pasca persalinan, anak usia 0 – 59 bulan, serta semua calon pengantin/calon pasangan usia subur melalui pendampingan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah untuk deteksi dini faktor risiko stunting dan melakukan upaya meminimalisir atau pencegahan pengaruh dari faktor risiko stunting.	Penyebab Internal - Tidak terpenuhinya asupan gizi keluarga - Kurangnya pengetahuan pola pengasuhan dan tumbuh kembang balita	Penyebab Eksternal - Kurangnya Fasilitas akses air minum dan sanitasi di lingkungan keluarga - Kurangnya Penguatan fasilitas pelayanan rujukan bagi keluarga dan calon pengantin/calon pasangan usia subur	Meningkatkan akses informasi dan pelayanan kepada keluarga dan/atau keluarga berisiko stunting seperti ibu hamil, ibu pasca persalinan, anak usia 0 – 59 bulan, serta semua calon pengantin/calon pasangan usia subur melalui pendampingan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah untuk deteksi dini faktor risiko stunting dan melakukan upaya meminimalisir atau pencegahan pengaruh dari faktor risiko stunting.	- Penyediaan dan penapisan data sasaran keluarga berisiko stunting; - Melakukan Pembinaan dan pendampingan Peningkatan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga - Melakukan Pembinaan dan pendampingan Pengasuhan dan tumbuh kembang balita	- Jumlah Tim Pendamping Keluarga sebanyak 966 Jumlah Nagari di Kab. Pesisir Selatan 182 Nagari/Desa.	Input : Rencana Aksi Dana/Anggaran Rp. 30.000.000 (Tapak pagu) Output : 1 Laporan (Pelaporan dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga melalui aplikasi pendampingan keluarga) Outcome: Tewujudnya percepatan penurunan stunting di Desa/Nagari

Tujuan : Meningkatkan akses informasi dan pelayanan kepada keluarga dan/atau keluarga beresiko stunting seperti ibu hamil, ibu pasca persalinan, anak usia 0 – 59 bulan, serta semua calon pengantin/calon pasangan usia subur melalui pendampingan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah untuk deteksi dini faktor risiko stunting dan melakukan upaya meminimalisir atau pencegahan pengaruh dari faktor risiko stunting.	Jumlah Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan Jumlah Nagari di Kab. Pesisir Selatan 182 Nagari/Desa.	Partisipasi Perlunya partisipasi lintas sektor untuk melakukan koordinasi, sinergi dan integrasi program kegiatan percepatan penurunan stunting						Indikator Kinerja Jumlah Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapatkan pendampingan
---	---	---	--	--	--	--	--	--

Catatan :

- A. Implementasi GAP sebagaimana matriks di atas bisa diletakkan sebagai pola pikir dalam penyusunan suatu dokumen kebijakan atau sebagai dokumen pendamping suatu rencana kebijakan atau program, kegiatan tertentu yang dipilih sesuai dengan prioritas.
- B. GAP ditingkat program dapat dilakukan apabila kegiatan-kegiatan yang ada didalamnya berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 90 Tahun 2020 merupakan kegiatan dengan ciri dan atau lokasi yang sama.
- C. Apabila kegiatan-kegiatan dalam sebuah program sangat beragam, atau sangat banyak, berbeda ciri dan atau lokasi maka analisis gender menggunakan GAP berbasis sub kegiatan.

Painan, 14 Juni 2024


Plt. KEPALA DINAS PMDPPKB
KAB. PESIR SELATAN

SALMAN ALFARIZI BRUTU, S.STP., M.Si.
NIP. 19780215 199802 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Setia Budi Nomor 200 Painan, kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,
Laman <https://dpmdppkb.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el : dinaspemdes@pesisirselatankab.go.id

**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)**

SKPD	:	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	:	2025
Program	:	2.14.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Kegiatan	:	2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Sub Kegiatan	:	2.14.04.2.01.0014 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
Analisis Situasi	:	1. Data Pembuka Wawasan : - Pelaksanaan pendampingan dengan melibatkan tim pendamping keluarga yang terdiri dari Bidan di desa, kader TP PKK dan Kader KB diharapkan dapat memberikan dampak signifikan dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu, balita dan fasilitasi bantuan sosial stunting bagi keluarga berisiko stunting. - Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan - Jumlah Nagari di Kab. Pesisir Selatan 182 Nagari/Desa. 2. Isu dan Faktor Kesenjangan : A. Faktor Kesenjangan - Akses Perlunya meningkatkan akses informasi dan pelayanan kepada keluarga dan/atau keluarga berisiko stunting seperti ibu hamil, ibu pasca persalinan, anak usia 0 – 59 bulan, serta semua calon pengantin/calon pasangan usia subur melalui pendampingan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah untuk deteksi dini faktor risiko stunting dan melakukan upaya meminimalisir atau pencegahan pengaruh dari faktor risiko stunting. - Partisipasi Perlunya partisipasi lintas sektor untuk melakukan koordinasi, sinergi dan integrasi program kegiatan percepatan penurunan stunting - Kontrol Perlunya peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat untuk mengontrol suksesnya kegiatan - Manfaat Tersedianya sumber daya manusia berkualitas, yakni sumber daya manusia yang sehat, cerdas, kreatif dan berdaya saing - Tim pendamping keluarga akan berperan sebagai ujung tombak percepatan penurunan stunting dan mengawal proses percepatan penurunan stunting dari hulu, terutama dalam pencegahan, mulai dari proses inkubasi hingga melakukan tindakan pencegahan lain dari faktor langsung penyebab stunting

	B. Penyebab Internal - Tidak terpenuhinya asupan gizi keluarga - Kurangnya pengetahuan pola pengasuhan dan tumbuh kembang balita C. Penyebab Eksternal - Kurangnya Fasilitasi akses air minum dan sanitasi di lingkungan keluarga - Kurangnya Penguatan fasilitas pelayanan rujukan bagi keluarga dan calon pengantin/calon pasangan usia subur
Rencana Tindak	: Kegiatan - Penyediaan dan penapisan data sasaran keluarga berisiko stunting; - Melakukan Pembinaan dan pendampingan Peningkatan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga - Melakukan Pembinaan dan pendampingan Pengasuhan dan tumbuh kembang balita Tujuan Meningkatkan akses informasi dan pelayanan kepada keluarga dan/atau keluarga berisiko stunting seperti ibu hamil, ibu pasca persalinan, anak usia 0 – 59 bulan, serta semua calon pengantin/calon pasangan usia subur melalui pendampingan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah untuk deteksi dini faktor risiko stunting dan melakukan upaya meminimalisir atau pencegahan pengaruh dari faktor risiko stunting. Aktivitas Melaksanakan pendampingan yang meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial dan surveillance kepada keluarga termasuk Calon Pengantin/Calon Pasangan Usia Subur dan/atau keluarga berisiko stunting serta melakukan surveilans kepada sasaran prioritas untuk mendeteksi dini faktor risiko stunting Sumber Daya (Input) : - Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK. - Penyediaan Data dan Informasi Keluarga. - Bidan di desa, kader TP PKK dan Kader KB - Aplikasi Pendampingan Keluarga Output 1 Laporan (Pelaporan dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga melalui aplikasi pendampingan keluarga) Outcome Tewujudnya percepatan penurunan stunting di Desa/Nagari
Alokasi Sumber Daya	: Anggaran Rp. 30.000.000 (Pagu Tapak) SDM : Bidan di desa, kader TP PKK dan Kader KB Indikator Kinerja Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapatkan pendampingan

Painan, 14 Juni 2024

Plt. KEPALA DINAS PMDPPKB
KAB. PESISIR SELATAN



SALMAN ALFARISI BRUTU, S.STP., M.Si
NIP. 19780215 199802 1 001